

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengembangan Desa Cikakak menjadi desa wisata maju dilaksanakan melalui delapan strategi pemberdayaan masyarakat. Strategi tersebut mencakup pelibatan aktif masyarakat dalam pendataan potensi, penyusunan profil desa, serta musyawarah arah pengembangan. Nilai-nilai adat dijadikan daya tarik utama melalui pendekatan personal kepada tokoh adat yang menetapkan batasan etis dan spiritual dalam aktivitas wisata. Penguatan regulasi dan kelembagaan dilakukan dengan menetapkan Perdes Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur peran BUMDes sebagai pengelola manajerial dan Pokdarwis sebagai pelaksana operasional untuk menjamin tata kelola yang adil dan akuntabel.

Strategi lainnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan di bidang *homestay*, pemandu wisata, seni budaya, dan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal. Kearifan lokal dilestarikan dengan menjadikan nilai gotong royong, adat istiadat, dan narasi budaya sebagai fondasi atraksi wisata dan media pemberdayaan kolektif. Inovasi lokal seperti kerajinan kepala monyet dan kuliner wajik kethek mencerminkan kemandirian ekonomi berbasis budaya. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses evaluasi melalui kuesioner dan visitasi tim penilai, serta diperkuat legitimasi sosial budayanya melalui pengakuan formal sebagai desa wisata maju.

Namun, strategi pemberdayaan yang dijalankan belum berkelanjutan karena lebih berfokus pada pencapaian status desa wisata maju. Strategi tersebut gagal membangun mekanisme jangka panjang yang mampu menjamin kemandirian, memperluas partisipasi masyarakat secara merata, serta memastikan keberlanjutan pengelolaan potensi wisata. Berbagai kendala yang muncul, seperti keterbatasan kapasitas masyarakat dalam

memanfaatkan teknologi, lemahnya koordinasi kelembagaan antara Pokdarwis dan BUMDes, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga ketimpangan distribusi manfaat aktivitas pariwisata, menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan. Akibatnya, pemberdayaan tersebut tidak mampu menghasilkan transformasi struktural yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan. Capaian status desa wisata maju lebih merepresentasikan pencapaian simbolis dan temporer, bukan hasil transformasi yang substantif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pengelola Desa Wisata Cikakak perlu membangun sistem evaluasi berbasis data yang partisipatif dan adaptif yang dilakukan secara rutin agar proses pengambilan keputusan tidak hanya bersifat administratif namun responsif terhadap dinamika lapangan, mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola desa wisata.
2. Bagi pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait, perlu dilakukan penguatan paradigma pemberdayaan yang substantif dengan menggeser orientasi pembangunan desa wisata dari sekadar pencapaian status administratif menuju upaya yang menumbuhkan kemandirian masyarakat. Strategi pemberdayaan yang dilakukan harus berakar pada kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya memenuhi target program.
3. Bagi peneliti selanjutnya, pada penelitian ini baru menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Cikakak menjadi desa wisata maju. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji dinamika relasi antar aktor lokal dan institusi eksternal dalam mendukung pengembangan desa wisata. Selain itu, dapat juga

mengkaji model pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.